

RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020-2025 MAGISTER ILMU HUKUM



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**



UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS I : JI. Teladan No. 15 Telp. 061-7362927 Fax. 061-7365650 Medan

KAMPUS II : JI. SM Raja Km. 8,5 / JI. Balai Desa Telp. 061-7872060 Medan

Website : Pasca.upmi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

NOMOR : 128/02.Dir/PPs.UPMI/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA PERIODE 2020–2025

Direktur Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk mewujudkan tata kelola Program Magister Ilmu Hukum yang efektif, efisien, dan berdaya saing, perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman arah pengembangan program studi;
2. bahwa Rencana Strategis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Periode 2020–2025 telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan universitas, serta kebijakan nasional pendidikan tinggi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Rencana Strategis Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Periode 2020–2025;
5. Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Periode 2020–2025;
6. Hasil Rapat Senat Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tentang Penetapan Dokumen Renstra Program Magister Ilmu Hukum Tanggal 10 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:

Menetapkan *Rencana Strategis (Renstra) Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Periode 2020–2025* sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program kerja dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum.

KEDUA:

Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum *KESATU* menjadi acuan dalam penyusunan rencana operasional tahunan (Renop), pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas akademik, serta pelaksanaan penjaminan mutu internal di lingkungan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

KETIGA:

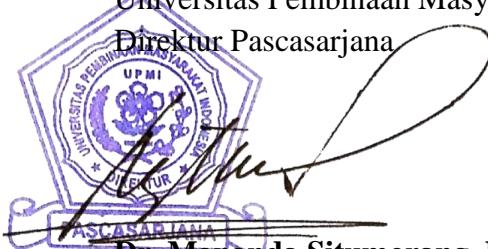
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal: 18 Agustus 2020

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Direktur Pascasarjana



Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si

Tembusan:

1. Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
2. Wakil Rektor I, II dan III UPMI
3. Wakil Direktur I, II dan III Pascasarjana UPMI
4. Senat Pascasarjana UPMI
5. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
6. Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi
7. Pertinggal

RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020-2025



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Periode 2020–2025 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang ilmu hukum yang berorientasi pada mutu, relevansi, serta daya saing dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perkembangan hukum nasional. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan strategis Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan berpedoman pada Rencana Strategis Pendidikan Tinggi (Renstra Dikti), serta memperhatikan visi, misi, dan tujuan institusi yang berorientasi pada penguatan tata kelola akademik, peningkatan kualitas penelitian hukum, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan hukum yang responsif terhadap kebutuhan bangsa. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga instrumen evaluasi dan pengendalian mutu akademik di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum. Dalam periode 2020–2025, Pascasarjana UPMI berkomitmen untuk mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi hukum yang unggul, berintegritas tinggi, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial masyarakat. Fokus strategis diarahkan pada penguatan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), peningkatan kapasitas dosen dan peneliti, perluasan jaringan kerja sama nasional dan internasional, serta peningkatan publikasi ilmiah bereputasi dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak nyata. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan visi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UPMI sebagai pusat unggulan pendidikan dan penelitian hukum yang berdaya saing nasional dan global. Akhirnya, kami berharap seluruh sivitas akademika dapat menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konsisten, inovatif, dan berkelanjutan demi kemajuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional.

Medan, 18 Agustus 2020

Program Pascasarjana

Direktur



Dr. Drs. Mananda Situmorang, M.Si

RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020 - 2025

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Renstra kami akan menyajikan bagaimana sejarah pendirian Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat UPMI dibentuk oleh Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syachrudin (YUPMIS) pada tahun 1991. Saat ini Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengelola 5 Fakultas dan 12 Program studi yang meliputi Program Studi S1-Teknik Mesin, Program Studi S1-Teknik Sipil, Program Studi S1-Sistem Informasi, Program Studi S1-Teknologi Informasi, Program Studi S1-Ilmu Administari Negara, Program Studi S1- Ilmu Hukum, Program Studi S1-Manajemen, Program Studi S1-Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi S1-Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi, S1-Agroteknologi, Program Studi S2-Ilmu Hukum, S2 Ilmu Administrasi.

RENSTRA ini disusun sebagai rencana kebijaksanaan jangka menengah 5 tahun, dan akan dipergunakan oleh pimpinan dan civitas akademika dalam usaha menempatkan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada tingkat tertentu dalam kompetisinya dengan lembaga lain. RENSTRA ini mulai dari titik berangkat kondisi riil keadaan lembaga sekarang, menjabarkan dengan lebih konkrit visi jangka panjang, mempertimbangkan kecenderungan perkembangan lingkungan makro dan mencari alternatif strategis yang dipercaya dapat menjamin tercapainya rencana tersebut. Ini berarti bahwa sebagai rencana jangka menengah rencana itu harus didasarkan atas cita-

cita masa depan dalam jangka panjang, namun sekaligus didasarkan atas kondisi riil lembaga pada saat ini sebagai titik berangkat.

Magister Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia membina Program Studi S1-Ilmu Hukum dalam berbagai konsentrasi. Kegiatan utama Magister Hukum PPS-UPMI meliputi tiga fungsi utama (Tridarma) Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) berdurasi lima tahun meliputi Tahun Akademik Tahun Akademik 2020-2025 Renstra Magister Hukum UPMI ini meliputi seluruh rencana kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi juga menyangkut rencana perkembangan tiap Program Studi dalam hal Kurikulum, Dosen Tetap, Laboratorium, Penelitian dan Kerjasama.

Tujuan Renstra Magister Hukum PPS-UPMI ini memberikan gambaran rencana pengembangan dan penerapan Program- program Studi dilingkungan Magister Hukum PPS-UPMI untuk Tahun Akademi 2020–2025 sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan dan dapat dibuat acuan untuk membuat pedoman dalam menyusun rencana kegiatan tahun ajaran dan persemester serta kegiatan pendukung lainnya.

Beberapa dasar pemikiran penyusunan Renstra Magister Hukum PPS-UPMI mencakup hal-hal berikut:

a. Visi Misi

Visi dan Misi Magister Hukum PPS-UPMI

1. Visi Magister Hukum PPS-UPMI adalah Menjadi Pusat Pengembangan Pengetahuan dibidang Magister Ilmu Hukum yang Unggul dan Terkemuka dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat.
- 2 Misi Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
 - a. Menyelenggarakan pendidikan Magister Ilmu Hukum berkualitas yang berstandar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada tingkat Magister Ilmu Hukum dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional dibidang hukum.
 - c. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan pada Pendidikan Magister Ilmu Hukum yang berdasarkan Kegiatan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
 - d. Melakukan Peran Lulusan Magister Ilmu Hukum didalam Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berwawasan Pengetahuan.

Dasar Pemikiran

1. Umum Akademis.

Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah unit pendidikan tinggi dibawah pengelolaan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan dibawah pembinaan Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syachrudin dimana misinya turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang ilmu hukum serta manajemen pengelolaan organisasi secara

luas. Ketentuan pendidikan yang dianut adalah pemenuhan kebutuhan kaidah keilmuan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Dikti Wilayah I (LLDIKTI I) serta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pelaksana perkuliahan selalu mengacu kepada ketentuan tersebut dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

2. Perencanaan Pengajaran

Dalam melaksanakan pendidikan, Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia selalu taat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pendidikan antara lain :

Sebelum pelaksanaan perkuliahan, persiapan administrasi kemahasiswaan dan fasilitas belajar mengajar harus tersedia dan valid.

Kurikulum dijamin valid sesuai dengan ketentuan kebutuhan dan dijabarkan kedalam pedoman akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Setiap Dosen harus mengecek validitas RPS.

Dosen Tetap harus melaksanakan pelaksanaan pembelajaran minimum 12 SKS (Satuan Kredit Semester). Para Dosen diharapkan dapat menjamin perkuliahan berhasil dengan optimal untuk diharapkan dapat memberikan materi perkuliahan yang berupa soft maupun Hard copy setiap selesai melaksanakan perkuliahan serta melaksanakan penelitian atau karya ilmiah minimal 1 (satu) judul dan memberikan saran pengabdian masyarakat.

3, Pelaksanaan Pengajaran

Pelaksanaan Perkuliahan harus berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibakukan dan ketentuan sesuai dengan kaidah akademis.

Harus termonitor dengan baik

Peserta kuliah harus sesuai dengan jumlah mahasiswa yang telah mengisi KRS

4. Evaluasi Hasil Belajar

Hasil belajar harus terkumpul sebelum melaporkan Ke Dikti. Hasil belajar harus sesuai dengan ketentuan jaminan mutu yang berlaku.

5. Arahan Universitas dan Yayasan

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas dan Yayasan mengarahkan beberapa hal sebagai berikut :

Magister Hukum PPS-UPMI menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan pendidikan atau lulusan yang bermutu dan meningkatkan kompetensinya.

Pelaksanaan pendidikan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara bersama dengan fakultas yang lain secara optimal.

Dapat menjalin kerjasama yang kondusif dengan seluruh civitas akademika.

Dapat memenuhi harapan mahasiswa dan pengguna lulusan.

6. Perencanaan Perkuliahan

Sarana Perencanaan Perkuliahan Magister Hukum PPS-UPMI

Perencanaan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan perkuliahan sebagai berikut :

a. Persiapan Perkuliahan

Sebelum dibuat perencanaan agar dievaluasi kemampuan nyata dan kemungkinan dukungan yang dibutuhkan. Untuk ini sebelum KRS agar di cek prestasi pembayaran dan akademis mahasiswa.

b. Pembuatan KRS.

Setelah dilaksanakan pengecekan persyaratan administrasi dan akademis selesai kemudian diterbitkan KRS untuk masing-masing mahasiswa.

c. Persiapan Tenaga Pengajar

Setelah KRS selesai dibuat dan dimengerti oleh semua mahasiswa kemudian ditunjuk atau diadakan komunikasi dengan Dosen pengampu mata kuliah.

7. Pembuatan Rencana Jadwal Perkuliahan

Setelah semua dukungan tersedia maka tahap berikutnya membuat jadwal perkuliahan.

a. Rapat Dosen

Sebelum perkuliahan diadakan rapat Dosen untuk membahas kesiapan perkuliahan dan evaluasi perkuliahan yang sudah berjalan.

b. Pelaksanaan Perkuliahan.

Pemberian Materi Kuliah. Dilaksanakan tiap mata kuliah 3 SKS yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Ujian. Ujian dilaksanakan 2 kali yang meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penugasan. Setiap mata kuliah diberikan penugasan yang berupa kajian buku atau penuangan hasil penelitian di lingkungan kerja.

c. Penelitian.

Dalam mata kuliah diwajibkan membuat penelitian sesuai dengan penerapan materikuliah dikaitkan dengan situasi lingkungan, baik dilingkungan kerja atau kehidupan masyarakat secara umum.

d. Pengabdian Masyarakat.

Untuk mengetahui manfaat dari pengetahuan yang telah diterima oleh mahasiswa, diharapkan dosen dan para mahasiswa dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan aplikasi pengabdianya sesuai dengan ilmu yang diterima.

8. Evaluasi Hasil Belajar Mengajar

Hasil Evaluasi. Evaluasi hasil belajar harus dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mutu yang dihasilkan .

- a. Mencerminkan proses penyelenggaraan pendidikan secara mandiri dan berkualitas.
- b. Mencerminkan Pemanfaatkan fasilitas secara maksimal.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan proses belajar mengajar dan perbaikan kurikulum.
- d. Hasil dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

9. Upaya dan Strategi

a. Upaya dalam lingkungan program studi

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan perkuliahan dengan membangun komunikasi sesuai dengan tuntutan kualitas, menjamin integritas dan komitmen dari civitas akademika.

- Melaksanakan pelayanan yang optimal terhadap mahasiswa sesuai dengan tuntutan kualitas dan pendidikan yang bermutu.
- Dosen Tetap yang berkualitas, mampu melaksanakan proses belajar mengajar dan penelitian , dengan pembinaan yang terarah.
- Pelaksanaan Penjamin Mutu Internal sesuai ketentuan dari Kemenristek Dikti dengan mengefektifkan Lembaga Penjamin Mutu dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat.
- Fasilitas pendidikan dengan Baik dan diajukan peningkatan kebutuhan kualitas sesuai kebutuhan.

b. Upaya Diluar Program Studi

- Menjaga Hubungan yang kondusif kelembagaan dengan seluruh civitas akademika dan Rektorat instansi yang terkait.
- Melaksanakan kegiatan promosi secara terpadu, untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang memadai. Selalu mematuhi ketentuan yang berlaku baik dari Universitas, LLDIKTI dan Dirjen Dikti Kemendikbudristek.
- Laporan Pembelajaran Melalui Feeder Dikti harus 100% setiap semester. Akreditasi harus segera disiapkan dan diajukan sesuai dengan masa berlakungnya
- Penelitian dan Pengabdian masyarakat harus di programkan

10. Strategi Pengembangan Program Studi

a. Pembinaan Dosen.

Pada saat ini dosen tetap di Magister Hukum PPS-UPMI ada 10 Dosen tetap dengan status kedudukan yang berbeda-beda, Untuk ini diupayakan pembinaan yang terpadu sebagai berikut :

b. Pembinaan Dosen Tetap.

Pembinaan Dosen Tetap meliputi :

- Proses pengajuan JAFA. Secara bertahap Dosen yang belum mempunyai JAFA di proses pengajuannya.
- Sertifikasi Dosen. Dosen Tetap yang sudah memiliki Sertifikat Dosen ada 6 Orang, untuk itu secara bertahap akan dilaksanakan pengusulan untuk diajukan sertifikasi.
- Bea Siswa untuk Penggantian Dosen Tetap Yang habis usia pengabdianya, secara bertahap diajukan studi lanjut program S-3, sesuai dengan kebutuhan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Pembinaan Dosen Tidak Tetap.Untuk menjamin rasa silaturahim dan komunikasi yang kondusif antara program studi dan para Dosen Tidak Tetap, secara periodik diadakan pertemuan berkala, untuk membahas materi ajaran, metode pengajaran yang baku dan aplikatif.
- Jumlah Mahasiswa. Jumlah mahasiswa aktif saat ini sekitar 94 mahasiswa dan mahasiswa baru orang setiap tahun diharapkan terus meningkat untuk dapat memperkuat Magister Hukum secara pendanaan untuk mendukung fasilitas dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
- Tenaga Administrasi. Dirasakan tenaga administrasi saat ini masih perlu peningkatan baik jumlah maupun kemampuannya, untuk ini secara bertahap akan dilaksanakan pembinaan dan peningkatan kualifikasi .

- Kurikulum sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar dan kemajuan proses belajar mengajar, setiap kurun waktu tertentu akan diadakan evaluasi dan penyesuaian kurikulum secara periodik.
 - Prosedur dan Ketentuan LLDIKTI/kemendikbudristek Dikti dan universitas sesuai dinamika program belajar mengajar, Magister Hukum PPS-UPMI selalu mengikuti ketentuan dari Kemendikbudristek Dikti yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti atau LLDIKTI. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
 - Organisasi. Organisasi perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan tuntutan kerja dan pengelolaan program. Perlu ditunjuk wakil Dekan dan Kepala Uni Penjamin Mutu Fakultas
 - Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Secara Organisatoris SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat sudah berjalan, tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan, keterpaduan peningkatan mutu harus selalu dijaga di setiap lini organisasi. Upaya peningkatan mutu harus selalu di programkan agar pelaksanaan Renstra mutu dapat tercapai perlu pembentukan SPMI Fakultas.
- c. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)), Wajib dipertahankan nilai Pelaporan pembelajaran mencapai 100%.
- d. Akreditasi. Pelaksanaan Akreditasi harus segera di persiapkan.
- e. Seminar. Setiap akhir semester diadakan seminar, baik secara lokal, nasional maupun internasional.
- f. Penelitian. Pada kurun waktu lima tahun kedepan agar dilaksanakan penelitian baik yang dilaksanakan mahasiswa maupun dosen.

g. Kerjasama. Pada kurikulum waktu lima tahun ke depan program kerja sama antara instansi baik pemerintah, bisnis maupun swasta serta kerja sama antara perguruan tinggi harus diupayakan

h. Peningkatan Program Studi.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar Program Studi perlu mengembangkan muatan pembelajaran yang pada saat ini merupakan konsentrasi pembelajaran di Program Studi

i. Kurikulum.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar dan perkembangan metode sesuai dengan ketentuan perlu dibuat/disesuaikan dengan Pedoman Pembuatan Kurikulum yang baru.

j. Sarana dan Prasarana

Fasilitas Perkantoran dan Pendukung Kegiatan

Ruang tunggu dosen dan kegiatan mahasiswa dan perpustakaan. secara minimal pada saat ini fasilitas tersebut sudah terpenuhi, namun untuk meningkatkan mutu lulusan dan pelayanan akademis perlu ditingkatkan kualitas dan keberadaannya sesuai dengan kebutuhan.

k. Laboratorium

Laboratorium yang secara minimal sudah memenuhi namun untuk meningkatkan mutu lulusan atau hasil didik perlu adanya peningkatan. Khususnya untuk laboratorium komputer, karena perangkat lunak sistemnya selalu berkembang supaya diperhatikan.

l. Alumni dan Lulusan

Pembinaan Kualitas Lulusan

Lulusan harus dibina sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar dan peningkatan dari semua komponen pendidikan maka kualitas lulusan harus meningkat dari tahun demi tahun

m. Pembinaan Alumni

Pembinaan Alumni dibina melalui peningkatan komunikasi antaraq Civitas Akademika dan alumni. Dalam rangka pembinaan alumni diharapkan hubungan yang kondusif antara alumni dan Civitas Akademika dapat terjalin dengan baik diharapkan dapat bertemu minimal 2 kali setiap tahun. Dari pertemuan ini diharapkan ada masukan yang berarti untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

n. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan Anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan berdasarkan kepada kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan Yayasan UPMIS. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan kualitas pengelolaan manajemen yang baik maka semua kegiatan yang bersifat rutin dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksana kegiatan rutin dengan baik ini kualitas pendidikan dan mutu hasil didik dapat memenuhi kebutuhan pengguna lulusan. Disamping itu dengan hasil pengelolaan yang baik ini kesejahteraan Dosen dan tenaga Akademis dan Non Akademis dapat lebih baik. Kegiatan rutin secara minimal dapat ditanggulangi dengan pengelolaan yang efektif dari prosentase pembayaran mahasiswa, namun untuk pengembangan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan yang terjadi pada lima tahun kedepan dipandang perlu adanya dana investasi dari Universitas atau Yayasan atau donatur yang lain.

b. Rencana Strategis: Arah dan Isi

Jika arah rencana strategis seperti dirumuskan dalam visi Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, maka RENSTRA Magister Hukum PPS-UPMI meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, merumuskan kembali peranannya yaitu menetapkan *core businessnya*. **Kedua**, menciptakan pondasi yang kuat sebagai penghasil tenaga yang handal dalam bidang Hukum. **Ketiga**, menciptakan sistem manajemen sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi kelambanan lembaga untuk tidak hanya reaktif terhadap perkembangan lingkungan, tetapi juga proaktif. **Keempat**, menciptakan *academic structure* yang lebih lentur, memberi kesempatan untuk melakukan berbagai adventure dan eksperimen dalam *exercise academic*. **Kelima** melakukan perubahan terobosan dan bukan perubahan yang incremental, lamban, linear dan reaktif. **Keenam**, mengubah *corporate* atau *organizational culture* menjadi *learning organization* yang penuh dinamika.

c. Isi dan Cakupan RENSTRA

Berdasarkan arah di atas, diidentifikasi cakupan rencana strategis yang meliputi:

1. Penetapan sasaran produktivitas yang berkualitas (*hard and soft skill*)
2. Kemampuan membangun kompetensi strategis dan kompetitif
3. Penelusuran dan pengembangan talenta
4. Pengembangan *Performance Based Culture*
5. Penguatan organizational integration melalui *decision making* yang berkualitas
6. Pengembangan *leadership, networking dan good governance*

7. Pengembangan kemampuan *self-financing*
8. Pengembangan Iklim dan kemampuan *entrepreneurship*
9. Pengembangan kerjasama dan *diversifikasi Funding*.
10. Pengembangan kemampuan melakukan *learning and growing, dan self renewal*.

II. ANALISIS RENSTRA Magister Hukum PPS-UPMI UPMI 2020-2025

RENSTRA ini dilengkapi dengan tabel dan gambar yang dimaksudkan untuk melengkapi pembahasan dan memberikan data tentang organisasi, dimasa lalu, saat ini dan harapan-harapan yang hendak dicapai di masa yang akan datang.

1. VISI MISI Magister Hukum PPS-UPMI

Dari pengkajian historis yayasan dan mandat yang diberikan kepada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, serta berbagai pikiran yang berkembang karena semangat zaman, ditetapkan visi, misi dan tujuan Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam perkembangannya di masa datang.

Visi dan Misi Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Visi Magister Hukum PPS-UPMI adalah Menjadi Pusat Pengembangan Pengetahuan dibidang Magister Ilmu Hukum yang Unggul dan Terkemuka dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat

Misi Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- a) Menyelenggarakan pendidikan Magister Ilmu Hukum berkualitas yang berstandar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b) Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada tingkat Magister Ilmu Hukum dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional dibidang hukum.
- c) Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan pada Pendidikan Magister Ilmu Hukum yang berdasarkan Kegiatan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
- d) Melakukan Peran Lulusan Magister Ilmu Hukum didalam Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berwawasan Pengetahuan.

Evaluasi Diri

Upaya Peningkatan Kemampuan Magister Hukum PPS-UPMI UPMI

- 1. Perlu mengadakan evaluasi pengembangan kurikulum agar dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi lebih mampu menghasilkan kompetensi lulusan sesuai yang diinginkan calon pengguna lulusan. Berkaitan dengan hal ini perlu dikembangkan Road Map guna menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi terutama untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2. Perlu meningkatkan kemampuan mahasiswa agar lulus tepat waktu dan IPK sesuai target.
- 3. Perlu *up-grading* Dosen Tetap agar seluruhnya lolos proses sertifikasi.
- 4. Perlu pengembangan dan meningkatkan kemampuan laboratorium.

Evaluasi diri Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dibagi dalam empat kajian, yakni evaluasi sumberdaya manusia dan sistem manajemen SDM, evaluasi sistem infrastruktur dan fasilitas lainnya, evaluasi

sumberdaya finansial dan manajemen keuangan, serta evaluasi program akademik dan sistem penjaminan mutu.

1) Evaluasi Sumberdaya Manusia dan Sistem Manajemen

Kekuatan
a. Dosen berpendidikan minimal S3
b. Tesedianya staf dosen yang berdedikasi tinggi lulusan perguruan tinggi yang memiliki reputasi layanan proses belajar dan pembelajaran yang bermutu.
c. Proses rekrutmen pimpinan staf administrasi melalui uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>).
d. Telah memiliki 10 orang Dosen Tetap dengan 6 orang Dosen Bersertifikat Tenaga Pendidik Profesional, 6 Dosen dengan Jenjang Jabatan Akademik Lektor dab 1 Dosen dengan Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, selebihnya belum memiliki Jenjang Jabatan Akademik.
e. Lulusan Magister Hukum PPS-UPMI UPMI dari angkatan pertama sampai terakhir 2020 sebanyak 85% terserap pasar kerja dalam bidang yang relevan (berdasarkan hasil pelacakan alumni tahun 2020)
Kelemahan
a) Rendahnya produktivitas sivitas akademika dalam penulisan karya ilmiah, buku ajar, dan keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah dalam dan luar negeri.
b) Rendahnya jumlah SDM yang memiliki wawasan dan kapabilitas bertaraf nasional dan internasional.
c) Jumlah mahasiswa yang masih sedikit dan berasal dari kelas menengah ke bawah.
d) Rendahnya Penelitian Dosen yang mendapatkan Hibah Dikti

- e) Implementasi rencana pengembangan staf dan dosen, bagi yang kuliah ke jenjang yang lebih tinggi masih terhambat.
- f) Sistem rekrutmen SDM belum sesuai dengan analisis kebutuhan.
- g) Belum adanya sistem pembinaan dan pengelolaan SDM.
- h) Para Dosen masih belum maksimal dalam Penelitian untuk mendapatkan Dana Hibah Dikti

Peluang

- a) Kemitraan dengan dunia kerja dan industri serta institusi lain sangat terbuka, termasuk luar negeri.
- b) Kesempatan membangun kerjasama dan jejaring dengan perguruan tinggi di luar negeri.
- c) Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat akan memberikan kesempatan dalam pengimplementasian hasil-hasil penelitian dalam masyarakat maupun dunia industri
- d) Kesempatan magang penelitian pada lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri akan memotivasi untuk meningkatkan mutu penelitian

Ancaman

- a) Persaingan antara PTS dan PTS, PTS dan PTN, semakin tinggi.
- b) Belum adanya regulasi SDM untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain dalam meningkatkan kemampuan SDM di PT.
- c) Pembajakan Dosen-dosen berkualitas.
- d) Perpindahan dosen ke PTS dapat menurunkan rasio dosen dan mahasiswa yang dapat melemahkan kualitas pembelajaran.

2) *Evaluasi Sistem Infrastruktur dan Fasilitas Lainnya*

Kekuatan
a) Lokasi sangat strategis, dan mudah dijangkau oleh berbagai sarana transportasi.
b) Memiliki beberapa fasilitas pendukung kegiatan akademik yang memadai. Misalnya, Lab Komputer, perpustakaan dan Aplikasi SIAKAD
c) Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan Instansi pemerintah dan swasta
d) Gedung Milik sendiri.
Kelemahan
a. Sarana dan prasarana laboratorium atau workshop belum ditata sesuai dengan baik untuk mendukung kebutuhan proses belajar mengajar.
b. Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan
c. Terbatasnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi civitas akademika
d. Terbatasnya sumber belajar bagi civitas akademika.
e. Belum memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional.
f. Belum memiliki sistem perencanaan terpadu yang sesuai dengan kebutuhan sarana penunjang pengembangan akademik
Peluang
a. Masyarakat makin membutuhkan layanan pendidikan yang mudah diakses dan fleksibel.
b. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan solusi bagi keterbatasan sarana dan prasarana.

- c. Skema pembiayaan melalui bantuan dalam dan luar negeri memberi peluang untuk perbaikan infrastruktur dan kenyamanan proses perkuliahan serta perluasan akses informasi yang lebih cepat.
- d. Memiliki peluang kerjasama dengan pihak dunia industri dan dunia usaha untuk mengantisipasi keterbatasan sarana dan prasarana.
- e. Kerjasama dengan Instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk penempatan lulusan Fakultas Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Ancaman

- a. PT lain yang memiliki fasilitas modern memberi rangsangan tersendiri bagi calon mahasiswa untuk mengenyam pendidikan di lembaga tersebut. Demikian pula dengan fleksibilitas layanannya.
- b. Inflasi yang menyebabkan biaya tinggi,
- c. Makin meningkatnya kemampuan kompetitor dalam menerapkan TIK.
- e. Derasnya arus pengembangan informasi dan IPTEKS..

3)Evaluasi Sumberdaya Finansial dan Sistem Manajemen

Kekuatan

- a. Support dan bantuan hibah dari Yayasan dapat membantu dalam menghadapi masalah pendanaan.
- b. Sistem pembiayaan untuk peningkatan yang dapat ditingkatkan tiap tahun.
- c. Berada dibawah naungan Yayasan yang berpengalaman.

Kelemahan

- a. Promosi yang terintegrasi/terkoordinasi, serta strategi komunikasi dan marketing yang kurang fokus dalam memasarkan Program Studi sehingga kurang memberikan dampak peningkatan peningkatan penerimaan mahasiswa.
- b. Belum ada sumber pendanaan lain selain dari mahasiswa.
- d. Belum tersedianya produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan berdampak pada perolehan *benefit* (*income generating, social benefit, cultural benefit*).
- e. Pembayaran oleh mahasiswa dengan cicilan.

Peluang

- a. Kebutuhan masyarakat pada layanan profesional, fleksibel, dan akuntabel makin meningkat.
- b. Makin berkembangnya kelompok masyarakat profesional yang ingin meningkatkan mutu akademik, membangun karakter, dan wawasan akademik.
- c. Kerjasama penelitian dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas dan intelektual Dosen yang profesional.
- d. Tawaran Hibah untuk pengembangan sarana dan prasarna kampus dari pemerintah semakin dibuka luas.

Ancaman

- a. Perkembangan PT lain dengan mutu layanan dan sarana prasarana yang memadai.

- b.. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin pesat dan kemudahan akses pendidikan serta sistem layanan pendidikan yang makin canggih, membuka peluang yang makin besar bagi PT di luar negeri memberi layanan pendidikan jarak jauh di Indonesia.

4) *Evaluasi Program Akademik dan Sistem Penjaminan Mutu*

Kekuatan

- a. Dimilikinya kemampuan pedagogik dan andragogik yang tinggi yang merupakan *core competence* Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional yang bermutu.
- c. Memiliki sistem proses perkuliahan yang cukup efektif dengan waktu yang cukup efisien dan tidak mengurangi mutu lulusannya.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akademik yang berkesinambungan.
- e. Kerjasama dengan berbagai Instansi pemerintah da swasta dan beberapa perusahaan lainnya untuk penyaluran lulusan.
- f. Lulusan tiap tahunnya terserap pasar kerja dengan waktu tunggu tidak lebih dari 6 bulan.

Kelemahan

- a. Program studi belum mendapatkan akreditasi dengan peringkat nilai A/Unggul. Hal ini salah penghambat untuk bisa lebih berkembang dalam hal peminatan calon mahasiswa
- b. Kurikulum baru yang mengarahkan kompetensi dunia usaha mutakhir masih relatif baru.

- c. Kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya di bawah standar yang ditetapkan secara internasional, sehingga akan mengurangi daya saing.
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan audit mutu akademik internal.
- f. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap dosen.

Peluang

- a. Adanya peluang melalui hibah kompetisi dari Dikti untuk peningkatan mutu pendidikan.
- b. Komitmen yang tinggi dari Direktorat Pendidikan Tinggi melalui HELTS dalam pencapaian mutu pendidikan yang akuntabel.
- c. Regulasi dalam bidang peningkatan mutu pendidikan memberikan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan nasional.
- d. Pengembangan program kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, serta dengan institusi pemerintah dan non- pemerintah.
- e. Regulasi pemerintah yang menjamin peningkatan anggaran pendidikan dan akses informasi yang lebih besar.
- f. Jejaring yang luas dengan dunia industri dan dunia usaha

Ancaman

- a. Tuntutan akan standar nasional dan internasional yang tinggi.
- b. Kompetitor yang telah lebih dahulu melaksanakan sistem penjaminan mutu.
- c. Masyarakat yang makin selektif memilih institusi pendidikan, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sampai saat ini belum menjadi pilihan utama.

2. kenali isu-isu strategik yang dihadapi oleh organisasi

Dengan merujuk pada evaluasi diri dapat dirumuskan isu strategis sebagaimana berikut:

- a. Pengembangan kurikulum yang mencakup:
 - 1) Pengembangan kompetensi umum yang menjadi karakter lulusan
 - 2) Pengembangan budaya akademik
 - 3) Penetapan standar-standar
 - 4) Pemanfaatan ICT
 - 5) Perluasan pendidikan kecakapan hidup (*lifesskill*)
- b. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia
 - 1) Standar mutu dan akreditasi
 - 2) Melengkapi Struktur Jabatan di seluruh jenjang Struktur Organisasi
 - 3) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 4) Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI
 - 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses PT
- c. Pencitraan publik
 - 1) Penciptaan peluang
 - 2) Dukungan perluasan akses bagi pendidikan yang bermutu
 - 3) Budaya organisasi
 - 4) Pengawasan dan penjaminan mutu
- d. Reformasi birokrasi
 - 1) Penatakelolaan organisasi
 - 2) Peningkatan akuntabilitas

- 3) Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pendidikan
- 4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan
- 5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan anggaran
- 6) Peningkatan kapasitas manajerial para pimpinan.
- 7) Pengembangan aplikasi SIM terintegrasi
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi.

3. Merumuskan strategi-strategi untuk mengelola isu-isu.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diperoleh rumusan strategi yang dirumuskan dari *competitive advantage* pada Analisis SWOT. Strategi-strategi tersebut adalah:

Berdasarkan prinsip di atas, strategi pengembangan Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia disusun sebagai berikut.

1. Untuk dapat berkembang dan memperoleh dukungan masyarakat, Magister Hukum PPS-UPMI UPMI membangun citranya sebagai Universitas yang berkualitas tinggi dan berwawasan global. Untuk itu, semua aktivitas berorientasi pada keunggulan yang menjamin citra lembaga di mata masyarakat.
2. Pengembangan Magister Hukum PPS-UPMI UPMI dilakukan secara sistemik, berkelanjutan, dan saling terkait satu dengan yang lain.
3. Magister Hukum PPS-UPMI UPMI dikembangkan berdasarkan kemandirian dengan semangat wirausaha untuk memenuhi kebutuhan internal dan masyarakat luas.

6. Tri Dharma Perguruan Tinggi diselenggarakan dengan mengutamakan pengembangan, pembentukan, penemuan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penyelenggaraan program akademik Magister Hukum PPS-UPMI UPMI ditujukan untuk menghasilkan intelektual dan profesional yang memiliki kematangan emosional, sosial, dan spiritual serta keterampilan hidup yang amat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Penyelenggaraan program Magister Hukum PPS-UPMI didasarkan pada komitmen dan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa yang bermartabat, memiliki harga diri dan kemauan untuk selalu berdiri sejajar dengan bangsa lain serta menjadi pemimpin yang bijak dalam lingkungannya.

4. Menyetujui dan mengadopsi strategi-strategi yang telah dipilih.

Program Kerja Sasaran, Indikator Kinerja Magister Hukum PPS-UPMI UPMI Berdasarkan Rencana Operasional 2020-2025 .

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
Organisasi,Tata Pamong dan Sumber Daya Manusia								
1	Perluasan organisasi dengan penambahan stuktur yang	Peningkatan efisiensi kerja	Menjadikan Pengelolaan organisasi lebih efektif	80%	80%	90%	100%	100%
		Peningkatan	Monitoring &	80%	80%	90%	100%	100%

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	ada	Penjaminan mutu internal	Evaluasi serta audit mutu internal (Monev) berjalan baik					
2	Mengembangkan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan dosen	peningkatan kualitas dan profesionalisme dosen	Capaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meningkat	80%	85%	90%	95%	100%
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen	Kualitas dan kuantitas dosen memiliki Jabatan Fungsional Dosen	60%	70%	80%	90%	100%
			Jumlah dosen pendidikan S3	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat Pendidik	3	4	4	5	7
3	Pengembangan kuantitas,	Peningkatan produktivitas,	Indeks kinerja karyawan minimal	70%	75%	80%	90%	100%

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	kualitas dan kesejahteraan karyawan	monitoring & evaluasi serta kinerja Karyawan	3,00 (skala 4.00)					
		Peningkatan kualitas dan kompetensi Karyawan	80 % tenaga kependidikan, tingkat pendidikannya S1	70%	80%	85%	90%	100%
Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni								
1	Meningkatkan efektivitas sumber daya dalam rangka meningkatkan mutu belajar mengajar	Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran	IPK rata-rata Program Studi	3,3	3,45	3,5	3,5	3,6
			Kurikulum, RPS lengkap	80%	90%	100%	100%	100%
		Terlaksananya proses pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	IPK rata-rata lulusan Meningkat	3,3	3,45	3,5	3,5	3,6
			Jumlah Mahasiswa mengikuti Kompetensi Program S2	20%	30%	40%	50%	60%
			Lama studi	2	2	2	1,8	1,8

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
2	Meningkatnya akreditasi program studi	Peringkat Akreditasi semua Program Studi meningkat	Akreditasi Program Studi	Baik	Baik	Baik	Baik	Unggu
3	Meningkatnya promosi berkelanjutan	Meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penerimaan mahasiswa baru yang meliputi sistem promosi, dan seleksi	% Peningkatan jumlah kenaikan mahasiswa baru	10%	20%	25%	30%	30%
4	Peningkatan pembinaan kreativitas mahasiswa	Keratifitas kegiatan mahasiswa yang berkualitas dan bermanfaat	Mutu dan Kuantitas kegiatan ekstrakurikuler	3	4	5	6	7
			Mengikuti program hibah kompetesi dari Luar Fakultas	4	6	8	10	12
5	Peningkatan	Terciptanya	Kuantitas kegiatan	1	2	2	3	3

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	komunikasi dengan alumni	hubungan yang berkesinambungan	melibatkan alumni per tahun					
Penelitian, PKM dan Kerjasama								
1	Peningkatan kinerja dosen dalam penelitian dan penerbitan artikel ilmiah	Peningkatan Mutu dan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Peningkatan mutu dan Kuantitas hasil penelitian Setiap Prodi meningkat setiap tahun	10	12	15	20	25
			Jumlah Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional/Internasional terindeks meningkat setiap tahun setiap Prodi	10	12	14	16	18
2	Peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam	Pelaksanaan Kegiatan PKM dalam rangka aplikasi keilmuan	Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat meningkat setiap tahun, setiap prodi	7	8	8	9	10

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	pelaksanaan kegiatan PKM							
3	Penongkatan kegiatan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta	Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PKM	Kuantitas dan realisasi kerja sama dengan meningkat setiap tahun	4	8	10	12	14
			Alumni yang diterima bekerja meningkat setiap tahun dengan mitra kerjasama	20%	25%	30%	35%	40%
			Rata-rata lama waktu tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan (dalam hitungan bulan)	4	3	3	2	1

Sarana Prasarana, Pelayanan Adm dan Keuangan

1	Peningkatan	Kenyamanan	Ruang kelas untuk	100%	100%	100%	100%	100%
---	-------------	------------	-------------------	------	------	------	------	------

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
	kapasitas ruang	mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan tanpa hambatan	semua program studi tercukupi					
2	Penyediaan laboratorium yang memadai	Kegiatan Praktikum dilaksanakan di kampus sendiri	100% kegiatan praktikum dilaksanakan di kampus sendiri	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan Ruang Perpusatakaan	Ketersediaan fasilitas perpustakaan yang memadai	Ketersediaan layanan koleksi buku teks dan jurnal ilmiah yang memadai	80%	80%	80%	90%	90%
4	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang	Ketersediaan sarana kampus yang nyaman dan kondusif	Ketersediaan kapasitas dan sarana penunjang terhadap seluruh kegiatan dikampus	80%	80%	90%	90%	100%
		Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, aman	Terciptanya keamanan dan kenyamanan dilingkungan	80%	85%	90%	95%	100%

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
		dan bersih	kampus					
Bidang Administrasi Umum dan Keuangan								
5	Peningkatan Tertib Prosedur dan Administasi	Konsistensi Tertib administrasi dan tata kelola sesuai Standar Operasional Prosedur	Tata kelola administrasi berbasis ICT	80%	80%	90%	90%	100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan	Peningkatan pendapatan Instusi	Kemandirian keuangan lembaga (tidak disubsidi)	65%	70%	75%	80%	85%
			Upaya memperoleh dana hibah pengelolaan pendidikan	50%	60%	70%	75%	80%
			Upaya investasi dan pengembangan SDM serta Sarana Prasarana	30%	40%	50%	60%	70%

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
		Pengelolaan secara efisien dan efektif meningkat	Administrasi pelayanan keuangan meningkat	80%	90%	100%	100%	100%

5. Merumuskan dan memantapkan visi organisasi ke masa depan

Berdasarkan evaluasi diri dan kondisi lingkungan Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat saat ini serta visi untuk menjadi perguruan tinggi Institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif, tahap pengembangan tahun 2020-2025 dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: (1) reposisi dan konsolidasi, (2) pemantapan dan mandiri, dan (3) ekspansi. Keseluruhan tahapan dilandasi empat aspek yang menjadi fokus pengembangan pada setiap tahapan. Keempat aspek tersebut yaitu: (1) tata kelola, (2) sumber daya manusia, (3) peningkatan keunggulan, dan (4) pencitraan publik.

- Tahap Reposisi dan Konsolidasi (Periode 2020-2022)
- Tahap Pemantapan dan Mandiri (Periode 2023-2024)
- Tahap Penguatan dan Perluasan (Periode 2025)

6. *Implementing Strategies.* Proses implementasi rencana

Implementasi strategis Institusi Pendidikan Yang Unggul Dan Kompetitif secara lengkapnya dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 1. Tahap dan Target Pengembangan Magister Hukum PPS-UPMI



Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu pada pemetaan secara makro terhadap kecenderungan pengembangan perguruan tinggi saat ini, dipadankan dengan kondisinya Magister Hukum PPS-UPMI berdasarkan evaluasi diri yang telah dilaksanakan. Pemadanan kondisi eksternal dan internal merumuskan arah kebijakan Magister Hukum PPS-UPMI mendatang yang bertumpu pada peningkatan keunggulan, kemandirian pembiayaan, perluasan akses belajar, manajemen dan kepemimpinan, pengembangan infrastruktur, pengembangan ventura, dan internasionalisasi.

Sejalan dengan prinsip pentahapan, Magister Hukum PPS-UPMI menetapkan tiga tahapan dan target pengembangan dalam upaya merealisasikan visi sebagai berikut: **Pertama**, tahap reposisi dan konsolidasi (2020-2022). Pada tahap ini target yang ingindicapai yaitu semua program studi terakreditasi Baik, terbentuknya lembaga jaminan mutu,tata kelola yang baik, penatan sistem manajemen, dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. **Kedua**, tahap pemantapan dan mandiri (2023-2024), dengan prioritas pengembangan meliputi penguatan kepemimpinan, pengembangan kerjasama,peningkatan kualitas akademik, perluasan basis

pembiayaan, dan pembudayaan kewirausahaan. **Ketiga**, tahap penguatan dan perluasan (2025) dengan target yang ingin dicapai yaitu layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi, manajemen kelembagaan dan akreditasi bertaraf nasional. Melalui ketiga tahap tersebut, diharapkan Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki keunggulan yang membanggakan pada taraf regional.

7. Proses evaluasi kembali.

RENSTRA Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini perlu dilakukan peninjauan kembali setiap tahun dan dilakukan revisi-revisi sesuai dengan perkembangan yang ada. Perlunya peninjauan kembali dan revisi adalah untuk melihat hal-hal mana yang telah berjalan dengan baik dan hal-hal mana yang perlu mendapatkan penguatan-penguatan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.

III. PENUTUP

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis kasar terhadap RENSTRA Magister Hukum PPS-UPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, kami menemukan beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pertama, beberapa item yang tertuang dalam renstra ini tumpang tindih dan dalam beberapa aspeknya masih membutuhkan review dan peninjauan kembali sehingga tercermin sebuah rencana strategis yang benar-benar dapat menjadi panduan pengembangan sebuah perguruan tinggi. Kedua, Setelah melakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal (EFAS) diperoleh bahwa hasil evaluasi diri dengan isu-isu strategis yang dipilih tidak disusun secara sistematis. Hal

ini kemudian menyebabkan analisis aspek-aspek selanjutnya menjadi samar dan kehilangan arah. Ketiga, ditemukan kesulitan untuk melakukan pembobotan terhadap aspek-aspek internal dan eksternal, karena beberapa item yang tidak disusun sesuai Prioritas yang ingin dicapai sesuai dengan tiga pembagian jangka waktu yang telah ditetapkan. Keempat, vision of success yang hendak dicapai direncanakan terlalu umum, dan tidak aplikatif. Hal ini membawa kesulitan tersendiri ketika hendak melihat hal-hal mana yang perlu direview kembali pada saat melakukan reassessing and review untuk melihat keterlaksanaan renstra.

DAFTAR ACUAN PUSTAKA

- UUD Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- UUD Guru dan Dosen 2005
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permendikti No.53 tahun 2023 Tantang Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia